

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang maupun negara maju sekalipun. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem dalam kelembagaan. Istilah pembangunan di Indonesia sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi

dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Selama proses pembangunan Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini dalam bidang ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menunjukkan adanya peningkatan. Tetapi walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menunjukkan adanya peningkatan, pertumbuhan ekonomi ini ternyata tidak dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia sesuai kebutuhan mereka sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

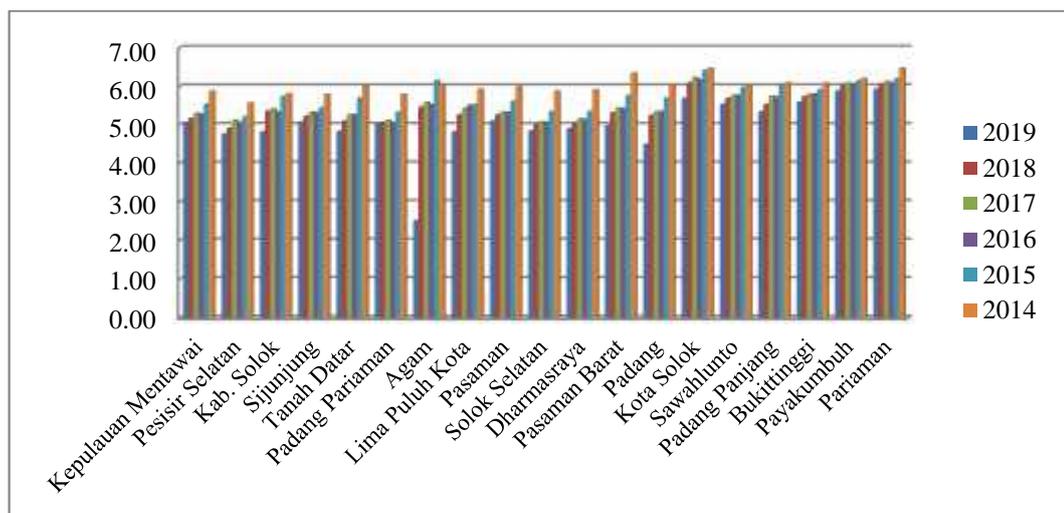
Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah disuatu negara merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman merupakan yang tertinggi dibanding kota/kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5,92%. Sedangkan dari tahun 2015 sampai 2018 pertumbuhan ekonomi di Kota Solok merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 6,41%, 6,17%, 6,23%, dan 6,09% . Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam merupakan

provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Barat yaitu 2,51%. Data ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat sendiri, pencapaian kesejahteraan ekonominya masih belum merata. Sehingga ketimpangan distribusi pendapatan juga terlihat dari hal ini.

Dari grafik 1.1 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi antar kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 berada pada angka yang positif, namun persentase pertumbuhan ini masih kurang merata antar provinsi.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2019



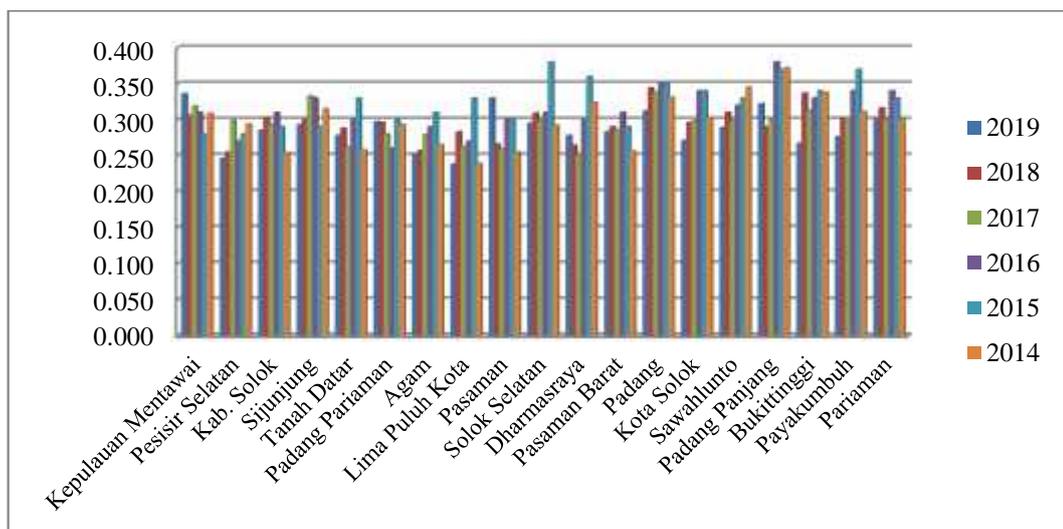
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain : Indeks Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah satu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai

Indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna.

Dari data BPS pada grafik 1.2 yang didapatkan terlihat bahwa, pada tahun 2019 indeks gini tertinggi diraih Kabupaten Kepulauan Mentawai Riau yaitu sebesar (0,336) dan terendah yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar (0,238). Setiap tahun daerah yang memiliki indeks gini tertinggi selalu berbeda. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 indeks gini tertinggi terjadi di daerah Kota Padang yaitu sebesar (0,338) dan (0,344).

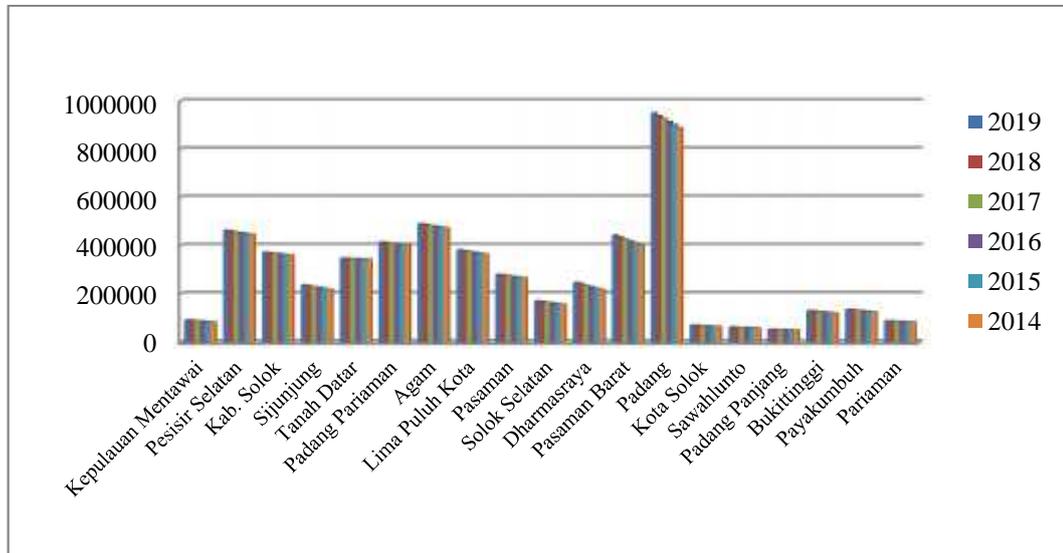
Grafik 1.2 Gini Rasio (Perkotaan+Pedesaan) Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Padang yang berjumlah 950.891 jiwa dan terendah di Kota Padang Panjang yang berjumlah 52.693 jiwa.

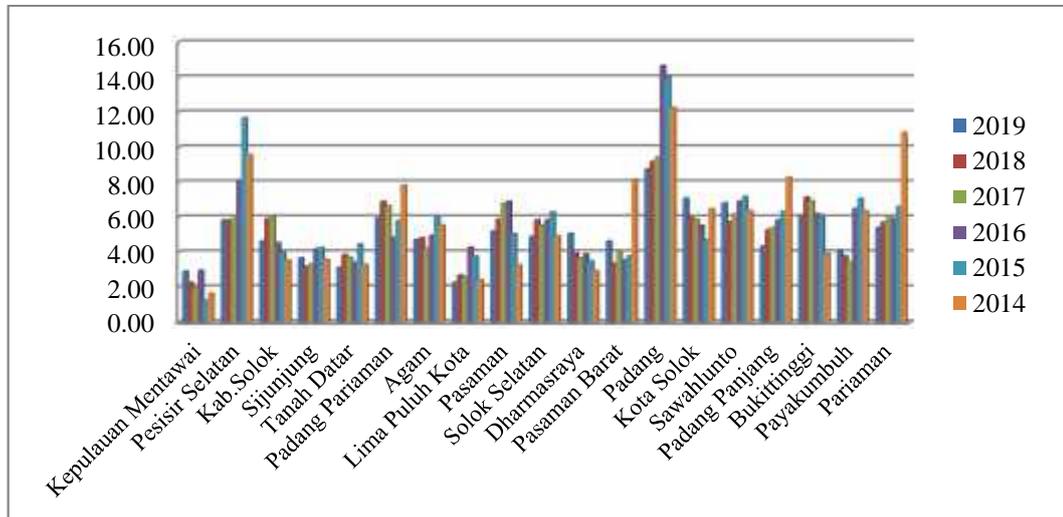
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Kota Padang sebagai kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, memiliki masalah tingkat pengangguran juga. Kota Padang menjadi kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi selama penelitian. Kota Padang tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 adalah 8,76%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persentase 2,28%. Kota Padang yang menjadi tingkat pengangguran terbuka tertinggi selama penelitian yaitu tahun 2014-2019 memiliki nilai tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,28%, 14,00%, 14,67%, 9,44%, 9,18% dan 8,76%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah tahun 2014-2018 terjadi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 1,66%, 1,25%, 2,97%, 1,96%, dan 2,27% (Sumber:bps.go.id).

Grafik 1.4 Tingkat pengangguran terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2019



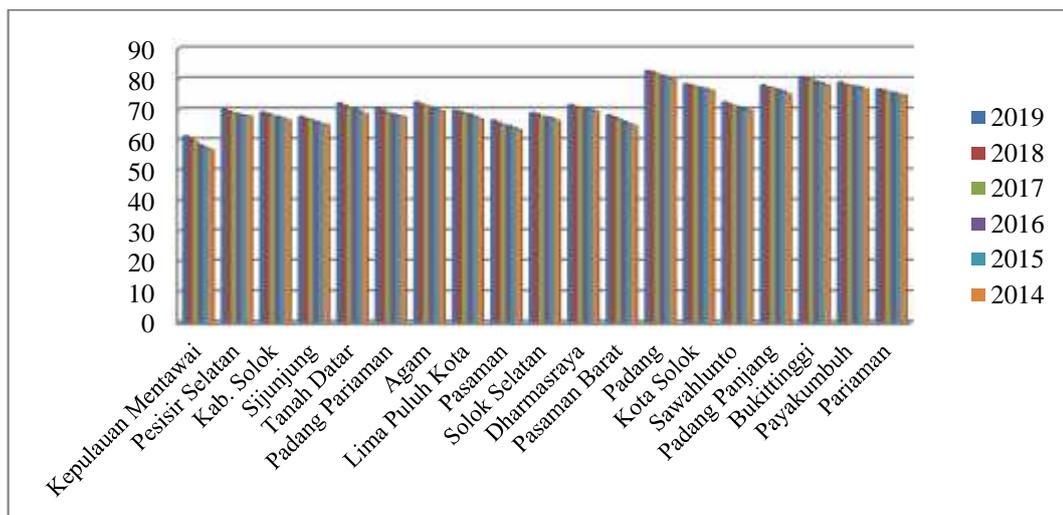
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara diseluruh dunia. Indonesia mengindikasikan bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai IPM.

IPM yakni tingkat harapan hidup merupakan factor kunci dalam penciptaan tenaga kerja yang produktif, tingkat harapan hidup di provinsi Jawa Timur tergolong cukup tinggi sehingga dapat membentuk dan menciptakan tenaga kerja yang produktif dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun sayangnya hal tersebut mengelompok hanya di daerah- daerah pusat aktivitas ekonomi, terutama pada daerah sentra/pusat industri atau daerah yang berpendapatan tinggi saja sehingga menyebabkan perumbuhan yang tidak merata dan memicu terjadinya kesenjangan ekonomi.

Selama periode penelitian 2014-2019 IPM tertinggi selalu diraih Kota Padang yaitu sebesar 79,83%, 80,36%, 81,06%, 81,58%, 82,25%, dan 82,68%. Sedangkan IPM terendah selama periode penelitian 2014-2019 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 56,73%, 57,41%, 58,27%, 59,25%, 60,28% dan 61,26% pada tahun 2018. Terlihat bahwa Kota Padang selalu berada diatas 75%. Ini menunjukkan bahwa di provinsi Kota Padang memiliki harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang paling baik antara semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi daerah yang memiliki IPM terendah bahkan IPM nya selama tahun 2014-2019 selalu berada dibawah 65%. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang paling kurang baik antara semua provinsi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.5 Indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Secara empiris ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Hasil penelitian Mugabe (2018:24) menunjukkan bahwa Secara simultan jumlah penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Secara parsial jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dan pengaruh tidak langsung investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tidak bisa dihitung nilainya, dikarenakan tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.

Penelitian Arif (2017:326-327) yang dijadikan acuan dalam penelitaian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tahun 2011-2015.

Penelitian Nita (2017:62) yang dijadikan acuan dalam penelitaian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, salah satunya

pendidikan. Pendidikan formal yang semakin tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Penelitian Ulfie (2014:10-11) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sementara pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, penelitian Simonsen (2011:37-38) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, begitu juga dengan desentralisasi fiskal.

Apabila aspek-aspek tersebut mampu membawa kebaikan dalam pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, maka hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud ingin meneliti mengenai **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan yang telah diuraikan, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019?

4. Bagaimana pengaruh Tingkat pengangguran terbuka terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019?
5. Bagaimana pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019.
2. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019.
3. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019.
4. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Tingkat pengangguran terbuka terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019.
5. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.
2. Bagi Pemerintah, Memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pemerataan pendapatan.